



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. BANGKA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



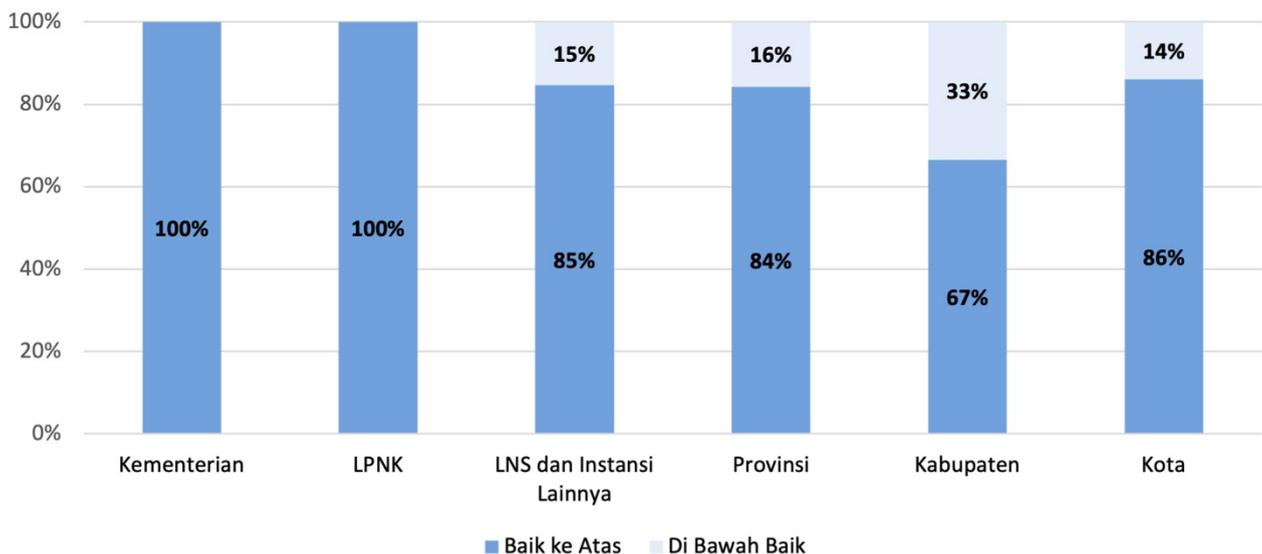
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

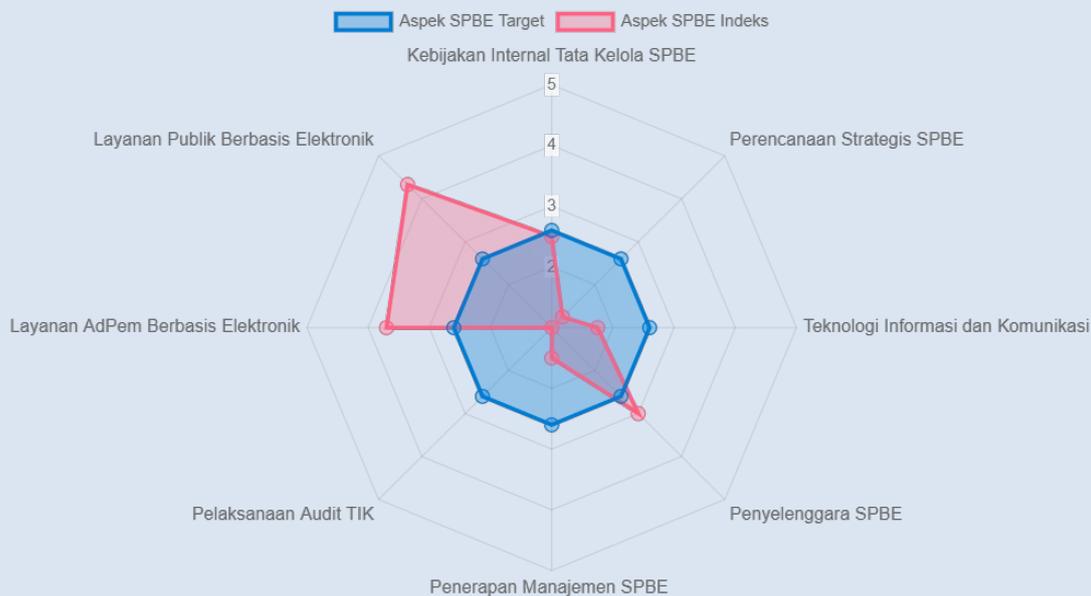
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,8
Domain Kebijakan SPBE	2,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>2,50</i>
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,25</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1,75</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,00</i>
Domain Manajemen SPBE	1,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,50</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	3,95
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,70</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,33</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

Kekuatan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola pada Pemkab Bangka dapat terlihat dengan adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Bangka. Kebijakan Internal yang ada dapat dibuktikan dengan adanya PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 42 TAHUN 2021 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih terdapat kelemahan yaitu belum mengatur kebijakan internal layanan pusat data di PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 42 TAHUN 2021. Kelemahan lainnya adalah pemenuhan ruang lingkup yang tidak lengkap pada beberapa kebijakan internal yaitu pada Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE dan Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenpanRB.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Inovasi Proses Bisnis SPBE walaupun sudah usang yaitu sejak tahun 2020.

- Kekuatan

Keunggulan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkab Bangka ini terlihat dengan adanya dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE walaupun sudah usang yaitu sejak tahun 2020.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum memiliki dokumen perencanaan strategis SPBE terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Rencana Anggaran SPBE yang secara resmi telah disahkan karena masih berupa draft.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya penerapan Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan

Keunggulan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkab Bangka adalah penerapan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan secara menyeluruh.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sedangkan Layanan Pusat Data masih dilaksanakan secara sebagian

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan

Keunggulan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkab Bangka adalah telah ditetapkan tim koordinasi SPBE yang ditetapkan dalam SK dan telah penerapan kolaborasi penerapan SPBE yang dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Teknis dengan instansi pemerintah lainnya.

- Kelemahan
Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum dilakukan reviu untuk peningkatan penyelenggaraan SPBE lebih lanjut sehingga mendapatkan nilai lebih baik

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, dan Manajemen Data

- Kekuatan
Keunggulan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkab Bangka telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko dan Manajemen Data
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemkab Bangka belum menerapkan Manajemen Keamanan Informasi secara menyeluruh sedangkan Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang belum dipenuhi oleh Pemkab Bangka

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya pelaksanaan Audit TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Bangka.
- Kelemahan
Pemkab Bangka masih belum melaksanakan Audit TIK terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi semua oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai melalui pemanfaatan aplikasi umum, aplikasi berbagi pakai, dan aplikasi yang dikembangkan sendiri

- Kekuatan
Keunggulan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemkab Bangka dapat terlihat adanya pelaksanaan Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi karena telah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakai yang terkolaborasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Demikian juga dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Kinerja Pegawai yang telah dilaksanakan hingga pada tahap transaksional dimana terdapat persetujuan dari pimpinan pada layanan tersebut. Adapun penggunaan aplikasi umum atau berbagi pakai tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan layanan kepada masyarakat.
- Kelemahan
Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum melaksanakan integrasi dan koaborasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Kinerja Pegawai dengan aplikasi SPBE lainnya sehingga masih dioperasikan secara mandiri yang memungkinkan perbedaan data

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi semua oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Keunggulan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemkab Bangka dapat terlihat adanya pelaksanaan semua layanan publik yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3 yang sudah menggunakan aplikasi umum serta mengembangkan aplikasi SPBE tematik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan layanan kepada masyarakat

- Kelemahan
Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum melaksanakan maintenance atau pemeliharaan terhadap semua Layanan Publik Berbasis Elektronik agar pelaksanaannya lebih optimal. Dan juga khusus pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masih belum terintegrasi dengan JDIHN

REKOMENDASI

- Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, secara umum Kebijakan internal sudah ditetapkan dalam peraturan daerah namun perlu melengkapi ruang lingkup pada kebijakan internal sesuai dengan ketentuan serta menambahkan pasal yang mengatur kebijakan internal tentang layanan pusat data yang harus digunakan oleh seluruh unit kerja
- Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dokumen perencanaan strategis harus disusun dan disahkan secara formal khususnya untuk arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Perencanaan Anggaran SPBE termasuk proses bisnis SPBE yang harus diupdate sesuai dengan arsitektur SPBE yang nanti akan ditetapkan
- Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, penggunaan TIK masih rendah oleh karena itu perlu diaktifkan penggunaan TIK sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat serta melengkapi dokumentasi pembangunan aplikasi SPBE dan Sistem Penghubung Layanan termasuk menerapkan ke semua unit kerja
- Aspek Penyelenggara SPBE, tugas dan fungsi tim koordinasi serta pelaksanaan kolaborasi dalam pelaksanaan SPBE di Pemkab Bangka perlu direviu untuk peningkatkan ke depan
- Aspek Penerapan Manajemen SPBE, semua penerapan manajemen SPBE harus segera dilaksanakan dan didokumentasikan sekecil apapun sehingga Manajemen SPBE dapat berjalan, dan jika diperlukan sebaiknya mengajukan asistensi pemenuhan penerapan manajemen SPBE pada KemenpanRB dan tim kordinasi SPBE lainnya atau dengan konsultan SPBE agar mendapatkan gambaran bagaimana penerapan manajemen yang baik
- Aspek Audit TIK, audit TIK sangat penting bagi kematangan SPBE oleh karena itu harus dilakukan secara periodik oleh tim Audit internal maupun eksternal. Apabila terdapat kendala terkait auditor bisa berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE
- Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek ini menjadi kekuatan utama dari Pemkab Bangka karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, namun layanan administrasi pemerintahan lainnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi aplikasi umum yang tersedia
- Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, sudah berjalan dengan baik sehingga juga menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan SPBE di Pemkot Bangka . Namun demikian, dalam rangka meningkatkan layanan publik maka perlu melengkapi atau memperbaiki proses bisnis yang belum dilaksanakan dengan optimal sebagai bentuk pemeliharaan

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024